

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2023
(LKjIP. TAHUNAN)**



**KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan ini merupakan informasi Kinerja Kecamatan Lumajang, yang di dalamnya merupakan gambaran capaian kinerja selama kurun waktu 1 Tahun Anggaran 2023. Dalam laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam Penyelenggaraan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018- 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, 31 Januari 2024


Kecamatan LUMAJANG
Drs. DEDY SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701218 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Permasalahan Dan Isu – Isu Startegis Perangkat Daerah	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Tujuan Kecamatan Lumajang	11
B. Sasaran Kecamatan Lumajang	11
C. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	15
A. Perbandingan Taret dan Capaian Tahun 2023.....	16
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya (5 Tahun Periode Rentra 2019-2023)	17
C. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Terakhir Rentra.....	18
D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota Lain/ OPD Lain.....	19
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	19
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	20
G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	21
H. Realisasi Anggaran.....	22
I. Capaian Kinerja Lainnya.....	25
BAB IV. PENUTUP	26
LAMPIRAN – LAMPIRAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Secara administrasi kewilayahan Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan dan 5 (lima) Desa yaitu :

- a) Kelurahan Citrodiwangsan;
- b) Kelurahan Ditotrunan;
- c) Kelurahan Jogotrunan;
- d) Kelurahan Jogoyudan;
- e) Kelurahan Rogotrunan;
- f) Kelurahan Tompokersan;
- g) Kelurahan Kepuharjo;
- h) Desa Labruk Lor;
- i) Desa Banjarwaru;
- j) Desa Denok;
- k) Desa Blukon; dan
- l) Desa Boreng

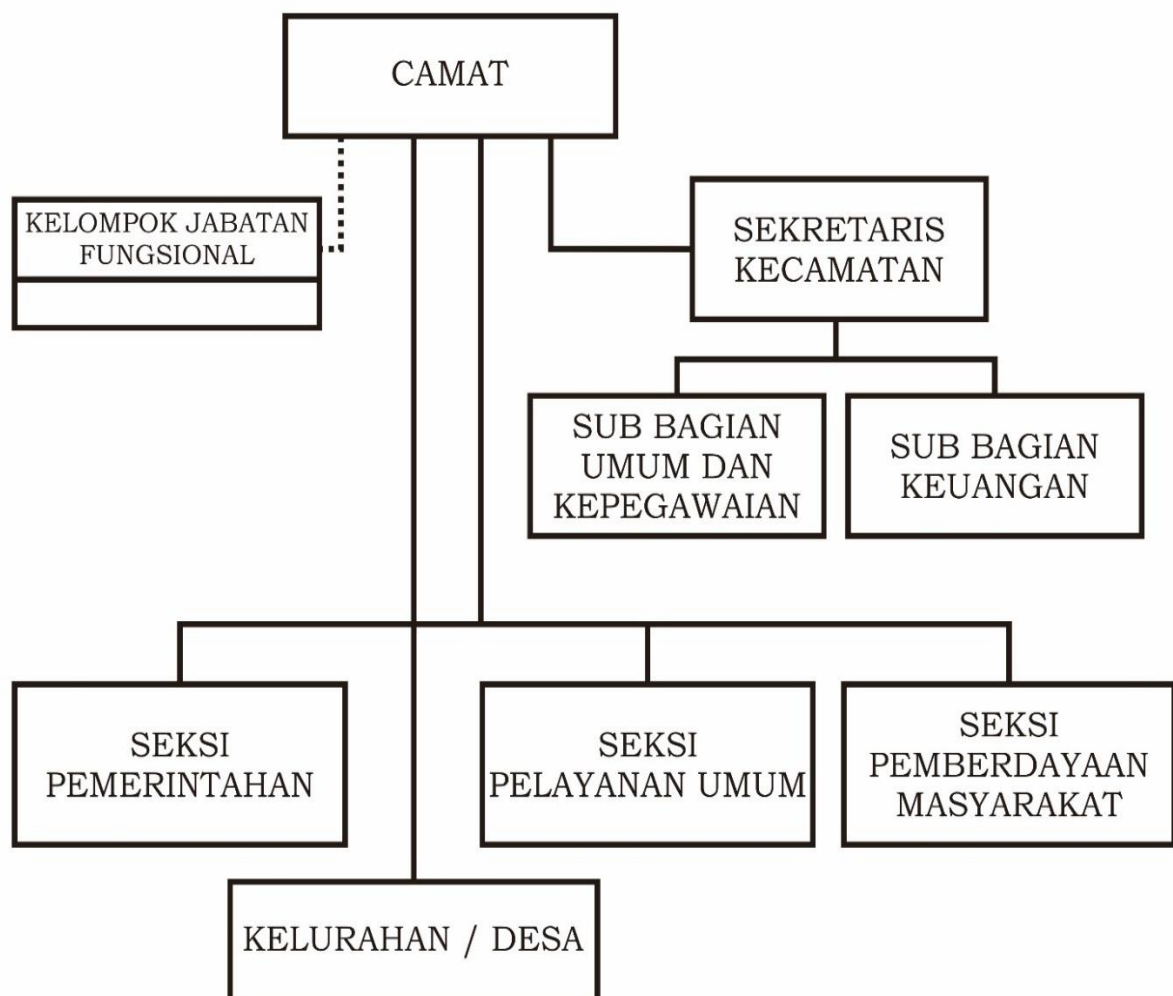
Struktur Organisasi Kecamatan Lumajang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Pelayanan Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Struktur organisasi Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tampak pada gambar berikut :

**KECAMATAN LUMAJANG
SESUAI PERATURAN BUPATI LUMAJANG NO 96 TAHUN 2019**



Keterangan : Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Lumajang

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Adapun Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan, rincian tugas pokok dari fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Camat

- (1) Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud camat mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - j. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

Data Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lumajang

Jumlah Pegawai Kecamatan Lumajang berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

REKAPITULASI KEPEGAWAIAN																		
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN, PANGKAT GOLONGAN																		
ESELON DAN IJASA TAHUN 2023																		
NO	URAIAN	JML	STATUS PENDIDIKAN								PANGKAT DAN GOLONGAN				ESELON			
			SD	SMP	SMA	D1	D3	D4	S1	S2	I	II	III	IV	IV b	IV a	IIIb	IIIa
1	PNS	58	1	1	17	-	5	5	26	3	2	11	42	2	28	9	1	1
2	P3K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TKB	57	-	3	22	1	1	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		115	1	4	39	1	6	5	56	3	2	11	42	2	28	9	1	1

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Lumajang didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan S1.

Aset : Kantor Kecamatan Lumajang memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Daftar Rekapitulasi Aset meliputi :

Tabel 1.2

REKAPITULASI JUMLAH ASET TETAP						
Tahun Anggaran : 2023						
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2023						
Lokasi : KECAMATAN LUMAJANG : (13215001)						
No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Keadaan Awal		Keadaan Akhir	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	1.3.1	GOLONGAN TANAH	2	Bidang	2	Bidang
2	1.3.1.01	- TANAH	2	Bidang	2	Bidang
3	1.3.2	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	217	Buah / Set	230	Buah / Set
4	1.3.2.01	- ALAT-ALAT BESAR	2	Buah / Set	2	Buah / Set
5	1.3.2.02	- ALAT-ALAT ANGKUTAN	7	Buah	6	Buah
6	1.3.2.03	- ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	Buah	-	Buah
7	1.3.2.04	- ALAT-ALAT PERTANIAN	-	Buah / Set	-	Buah / Set
8	1.3.2.05	- ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	140	Buah	146	Buah
9	1.3.2.06	- ALAT-ALAT STUDIO & KOMUNIKASI	14	Buah	14	Buah
10	1.3.2.07	- ALAT-ALAT KEDOKTERAN	1	Buah	1	Buah
11	1.3.2.08	- ALAT-ALAT LABORATORIUM	-	Buah	-	Buah
12	1.3.2.09	- ALAT-ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN	-	Buah	-	Buah
13	1.3.2.10	- KOMPUTER	53	Buah	61	Buah
14	1.3.2.11	- ALAT EKSPLORASI	-	Buah	-	Buah
15	1.3.2.12	- ALAT PENGEBORAN	-	Buah	-	Buah

No.	Kode Bidang	Pembidangan Barang	Keadaan Awal		Keadaan Akhir	
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
16	1.3.2.13	- ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PE	-	Buah	-	Buah
17	1.3.2.14	- ALAT BANTU EKSPLORASI	-	Buah	-	Buah
19	1.3.2.16	- ALAT PERAGA	-	Buah	-	Buah
20	1.3.2.17	- PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	Buah	-	Buah
21	1.3.2.18	- RAMBU - RAMBU	-	Buah	-	Buah
22	1.3.2.19	- PERALATAN OLAH RAGA	-	Buah	-	Buah
23	03	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	9	Buah	9	Buah
24	1.3.3.01	- BANGUNAN GEDUNG	8	Buah	8	Buah
25	1.3.3.02	- MONUMEN	1	Buah	1	Buah
26	04	GOLONGAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	1	Buah	1	Buah
27	1.3.4.01	- JALAN DAN JEMBATAN	1	Buah	1	Buah
28	1.3.4.02	- BANGUNAN AIR / IRIGASI	-	Buah	-	Buah
29	1.3.4.03	- INSTALASI	-	Buah	-	Buah
30	1.3.4.04	- JARINGAN	-	Buah	-	Buah
31	05	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	-	Buah / Set	-	Buah / Set
32	1.3.5.01	- BUKU DAN PERPUSTAKAAN	-	Buah / Set	-	Buah / Set
33	1.3.5.02	- BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	-	Buah / Set	-	Buah / Set
34	1.3.5.03	- HEWAN	-	Ekor / Buah	-	Ekor / Buah
35	1.3.5.04	- BIOTA PERAIRAN		Buah	-	Buah
36	1.3.5.05	- TANAMAN		Buah	-	Buah
37	1.3.5.06	- BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		Buah	-	Buah
38	1.3.5.07	- ASET TETAP DALAM RENOVASI		Buah	-	Buah
39	06	GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENG	1	Buah	1	Buah
40	1.3.6.01	- GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM PENG	1	Buah / Set	1	Buah / Set
TOTAL :			230		243	

B. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidangurusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Lumajang yaitu kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

- a) Kurang tepatnya jangka waktu penyelesaian administrasi kependudukan di lingkungan Kecamatan Lumajang;
- b) Administrasi Pemerintahan Desa belum kooperatif dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c) Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat belum dilaksanakan dengan optimal;

- d) Kondisi sarana dan prasarana yang masih kurang optimal;
- e) Adanya aturan atau kebijakan yang sering mengalami perubahan khususnya di bidang pengadministrasi keuangan dan barang ;
- f) Kurangnya koordinasi pada Pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan Lumajang khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

b. Akar Masalah

- a) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal;
- b) Masih adanya calo (jasa berbayar) dalam pengurusan adminduk;
- c) Masih adanya keterbatasan dalam penyelesaian adminduk pada tahap legalisir oleh dinas terkait;
- d) Penyelesaian administrasi keuangan (pajak PBB) desa tidak tepat waktu;
- e) SDM ahli di Desa yang masih kurang dalam hal pelaksanaan pembangunan infrasturktur Desa;
- f) SDM personil LINMAS belum terbina dan terlatih secara maksimal;
- g) Adanya refocusing / selfblocking pada anggaran Kecamatan Lumajang sehingga kurang maksimalnya pemeliharaan/ pemenuhan sarana prasarana pada Kantor Kecamatan Lumajang dan Kelurahan;
- h) Kurang sinkronnya peraturan keuangan yang berlaku sehingga menyulitkan koordinasi dalam penyusunan administrasi keuangan Kecamatan Lumajang dan Kelurahan;
- i) SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lumajang yang masih belum terpenuhi.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN LUMAJANG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Masih adanya keterbatasan dalam penyelesaian adminduk pada tahap legalisasi dokumen kependudukan di Dispendukcapil
			Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal
			Masih kurang aktifnya masyarakat dalam proses penyelesaian dokumen adminduk (kotak saran dan pengaduan)
			Masih adanya calo (jasa berbayar) dalam pengurusan adminduk
			Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
			Masih Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
			Adanya refocusing / selfblocking pada anggaran Kecamatan Lumajang sehingga kurang maksimalnya pemeliharaan/ pemenuhan sarana prasarana pada Kantor Kecamatan Lumajang dan Kelurahan
			Kurang sinkronnya peraturan keuangan yang berlaku sehingga menyulitkan koordinasi dalam penyusunan administrasi keuangan dan barang Kecamatan Lumajang dan Kelurahan
			SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Lumajang yang masih belum terpenuhi
			SDM ahli di Desa yang masih kurang dalam hal pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa

C. Isu- Isu Strategis pada Perangkat Daerah

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di Lingkungan Kecamatan Lumajang maka dapat ditentukan isu- isu strategis sebagai berikut

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini penguasaan teknologi oleh petugas pemberi jasa/manfaat pelayanan publik kepada masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM. Contoh penggunaan buku tamu masih menggunakan sistem manual;

2. Kualitas SDM yang masih rendah karena masih adanya petugas / pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi nya di Perangkat Daerah tidak sesuai dengan disiplin ilmu dan kurangnya pelatihan/diklat atau bimtek untuk meningkatkan kualitas kemampuan aparatur;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki kelengkapan adminduk dalam penggunaan kehidupan sehari sehari;
4. Kurangnya koordinasi dan integrasi dalam hubungan Perangkat Desa dengan Pemerintah Kecamatan Lumajang dalam pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran desa;
5. Adanya pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024 sehingga diperlukan peningkatan dan pengawasan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Lumajang dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada linmas dan pencegahan preventif dengan cara menguatkan hubungan / harmonisasi dengan semua aspek masyarakat dan lintas sector di wilayah Kecamatan Lumajang.

Tabel 1.3

POHON KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN KECAMATAN

Tujuan Kecamatan Lumajang diantaranya :

- a) Penyesuaian target kinerja sesuai dengan realisasi masyarakat yang ada pada Tahun 2023 dengan tetap memprioritaskan Peningkatan kepuasan masyarakat.
- b) Adanya koordinasi dan komitmen yang lebih baik di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan Lumajang terutama dalam pencapaian tujuan memberikan pelayanan publik dengan maksimal kepada masyarakat yaitu pemenuhan sarana dan prasarana pada Perangkat Daerah
- c) Efisiensi anggaran dengan memprioritaskan pemenuhan sarana prasarana yang berimbas kepada kepuasan masyarakat dalam proses memberikan pelayanan PATEN di Tingkat Kecamatan Kelurahan dan Desa.

B. SASARAN KECAMATAN

1. SASARAN STRATEGI :

- a. Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan
- b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

2. SASARAN PROGRAM :

- a. Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran
- b. Meningkatnya pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public
- c. Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemberdayaan desa dan kelurahan
- d. Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemenuhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Meningkatnya pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- f. Meningkatnya desa tertib administrasi

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kecamatan Lumajang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja Kecamatan Lumajang adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun .

Penetapan Kinerja tahun 2023 Kecamatan Lumajang di buat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Kecamatan Lumajang, berikut penetapan Kinerja yang telah dibuat:

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	90%
3	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemberdayaan desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	86%
4	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemenuhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86%
5	Meningkatnya pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%

6	Meningkatnya desa tertib administrasi	Persentase desa yang menerapkan RKPDes tepat waktu	82%
		Persentase desa yang menerapkan APBDes tepat waktu	82%
		Persentase desa yang menerapkan LPPDes tepat waktu	82%

	Program	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.826.972.646,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	9.000.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	3.813.410.150,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	104.085.000,-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	7.950.000,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	140.400.000,-
	JUMLAH	Rp	12.901.817.796,-

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya pemenuhan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	90%
3	Meningkatnya pemenuhan fasilitas pemberdayaan desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	86%
4	Meningkatnya pemenuhan fasilitas pemenuhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86%
5	Meningkatnya pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase fasilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%
6	Meningkatnya desa tertib administrasi	Persentase desa yang menerapkan RKPDes tepat waktu	82%
		Persentase desa yang menerapkan APBDes tepat waktu	82%
		Persentase desa yang menerapkan LPPDes tepat waktu	82%

	Program	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.774.396.384,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	18.900.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	3.667.364.200,-
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	90.660.000,-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	17.729.250,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	149.850.000,-
	JUMLAH	Rp	12.718.899.834

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Lumajang telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Untuk mencapai target dari masing-masing sasaran maka perlu diketahui efisiensi sasaran, caranya adalah menggunakan metode pengukuran kinerja dengan membandingkan rata – rata prosentase capaian kinerja SKPD dengan prosentase penyerapan anggaran, jika rata – rata prosentase capaian kinerja lebih kecil dari prosentase serapan anggaran maka belum efisiensi, tetapi jika rata – rata prosentase anggaran lebih besar dari prosentase serapan anggaran maka sudah efisiensi.

Dengan melihat Capaian kinerja Kecamatan Lumajang sepanjang tahun 2018-2023 maka akan dapat dilakukan :

- 1). Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Capaian Tahun 2023
- 2).Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya (5 tahun periode rentra 2019 –2023)

- 3). Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Terakhir Rentra
- 4). Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standart Nasional/ Propinsi/ Kabupaten/Kota Lain / OPD Lain
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Metode Pengukuran Kinerja yang di gunakan Kecamatan Lumajang adalah membanding realisasi rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berikut akan di sajikan pernyataan kinerja sasaran strategis beserta analisis kinerja :

a. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Tahun 2023

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah Menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lumajang juga melakukan review terhadap indikator kinerja utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Lumajang tahun 2023.

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indicator	Target	Realisasi	capaian
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan fasilitas dan koordinasi kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100%	98%	98%
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	90%	100%	111%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	86%	98%	114%
			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86%	73%	85%
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	82%	75%	92%
				Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	82%	100%	122%
				Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	82%	100%	122%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya (5 tahun periode renstra 2019 –2023)

Secara umum Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Sasaran dan indikator sasaran pada tahun 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu terdapat satu sasaran dan 2 (dua) indikator. Secara umum, capaian kinerja tahun 2022 dapat dipertahankan dan bias ditingkatkan pada Tahun 2023.

TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat		Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Lumajang	87,65	86,70	87,31	87,46	86,28
	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	N/A	100%	100%	100%	100%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Terakhir Renstra

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dibandingkan dengan target pada Renstra Kecamatan Lumajang. Target kinerja Triwulan Tahun 2023 telah sesuai dengan target pada Renstra Kecamatan Lumajang tahun 2023

TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Target
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat		Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Lumajang	87,65	86,70	87,31	87,46	86.5
	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	N/A	100%	100%	100%	95%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain/ OPD Lain

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dibandingkan dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain/ OPD Lain

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI OPD LAIN TH 2023
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat		Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Lumajang	86,28	83.03
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	100%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

1. Masalah sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan, sehingga penerapan “*the right man on the right place*” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

2. Strategi Pemecahan Masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan mengikut sertakan setiap diselenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan, sosialisasi dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun pihak lain yang berkompeten.

3. Masalah Sarana dan Prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam manajemen dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas.

4. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasinya dengan melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

5. Peraturan atau Kebijakan yang berubah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kali perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Adanya perubahan-perubahan tersebut berdampak secara langsung terhadap

pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk dapat memahami peraturan tersebut memerlukan waktu secara bertahap. Adanya perbedaan dalam pemahaman sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian target kinerja keuangan.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANALISIS PROGRAM
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat		Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Lumajang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan capaian anggaran pada tahun 2021. Analisis tersebut ditunjukkan dalam Lampiran

Sasaran Program	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN				Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	PAGU	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	8.819.266.488	8.631.303.308	93%	7%	7%
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	90%	100%	100%	18.900.000	18.900.000	100%	0%	0%
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemberdayaan desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	86%	100%	100%	3.867.898.650	3.867.898.650	100%	0%	0%
Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemenuhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86%	100%	100%	100.005.000	100.005.000	100%	0%	0%
Meningkatnya pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	17.625.000	17.625.000	100%	0%	0%
Meningkatnya desa tertib administrasi	Persentase desa yang menerapkan RKPDes tepat waktu	82%	100%	100%	140.400.000	140.400.000	100%	0%	0%
	Persentase desa yang menerapkan APBDes tepat waktu	82%	100%	100%	-	-	100%	0%	0%
	Persentase desa yang menerapkan LPPDes tepat waktu	82%	100%	100%	-	-	100%	0%	0%

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	Kerjasama dan tanggungjawab baik tingkat Kecamatan dan Kelurahan
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	100%	Memaksimalkan sarana prasarana yang ada dengan baik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100%	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat Kecamatan, Perangkat Daerah sampai masyarakat
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat Kecamatan, Perangkat Daerah sampai masyarakat (linmas)
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	Kerjasama dan koordinasi yang sinergi
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menerapkan RKPDes tepat waktu	100%	Koordinasi, fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan kepada desa
		Persentase desa yang menerapkan APBDes tepat waktu	100%	Komitmen dari semua pihak baik tingkat Kecamatan dan Desa
		Persentase desa yang menerapkan LPPDes tepat waktu	100%	Komitmen dari semua pihak baik tingkat Kecamatan dan Desa

g. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Lumajang tahun 2023 tiap Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
01	PENDAPATAN				
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
03	Pendapatan Pajak Daerah	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
08					
09	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
13	Dana Bagi Hasil Cukai	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
14	Dana Alokasi Umum	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
15	Dana Alokasi khusus	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 15)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
19	Dana Otonomi Khusus	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
20	Dana Penyesuaian	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (19 s/d 20)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
22					
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (24 s/d 25)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
27	Total Pendapatan Transfer (16 + 21 + 26)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
28					
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
30	Pendapatan Hibah	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00

31	Pendapatan Dana Darurat	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
32	Pendapatan Lainnya	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 33)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
35					
36	BELANJA				
37	BELANJA OPERASI				
38	Belanja Pegawai	6.219.837.690,000,00	6.134.269.169,000,00	98,620,00	0,000,00
39	Belanja Barang	922.199.153,000,00	909.879.081,000,00	98,660,00	0,000,00
40	Bunga	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
41	Subsidi	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
42	Hibah	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
43	Bantuan Sosial	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
44	Bantuan Keuangan Partai Politik	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
45	Jumlah Belanja Operasi (38 s/d 44)	7.142.036.843,000,00	7.044.148.250,000,00	98,630,00	0,000,00
46					
47	BELANJA MODAL				
48	Belanja Tanah	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin	75.981.609,000,00	75.921.000,000,00	99,920,00	0,000,00
50	Belanja Gedung dan Bangunan	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
54	Belanja Aset Lainnya	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
55	Jumlah Belanja Modal (48 s/d 54)	75.981.609,000,00	75.921.000,000,00	99,920,00	0,000,00
56	BELANJA TAK TERDUGA				
57	Belanja Tak Terduga	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (57)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
59	JUMLAH BELANJA (45 + 55 + 58)	7.218.018.452,000,00	7.120.069.250,000,00	98,640,00	0,000,00
60					
61	TRANSFER				
62	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
63	Bagi Hasil Pajak	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
64	Bagi Hasil Retribusi	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
65	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
66					
67	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (63 s/d 65)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
68	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (59 + 67)	7.218.018.452,000,00	7.120.069.250,000,00	98,640,00	0,000,00
69					
70	SURPLUS/DEBIT (34 - 68)	(7.218.018.452,00)	(7.120.069.250,00)	98,640,00	0,000,00

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
71					
72	<u>PEMBIAYAAN</u>				
73					
74	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
75	Penggunaan SILPA	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
76	Pencairan Dana Cadangan	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
77	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
85	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
87	Jumlah Penerimaan (75 s/d 86)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
90	Pembentukan Dana Cadangan	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
91	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
98	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
99	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
100	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
101	Jumlah Pengeluaran (90 s/d 100)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
102	PEMBIAYAAN NETTO (87 - 101)	0,000,00	0,000,00	0,000,00	0,000,00
103					
104	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (70 + 102)	(7.218.018.452,00)	(7.120.069.250,00)		0,000,00

h. Capaian Kinerja Lainnya

Pelaksanaan Inovasi

Inovasi itu kami beri nama **BCA (Berkas Cukup WA)** . **BCA** merupakan Inovasi sederhana untuk pelayanan pengajuan dokumen kependudukan yang kami buat dengan menggunakan bantuan media komunikasi **WhastApp** atau yang lebih dikenal dengan **WA**. Dengan Inovasi ini (**BCA**) akan mempermudah masyarakat dalam pengajuan dokumen kependudukan masyarakat cukup mengirimkan berkas persyaratan nya lewat WhatsApp,dan kemudian berkas pengajuan akan diterima dan di verifikasi oleh petugas pelayanan lewat WhatsApp web kecamatan lumajang. Jika berkas persyaratan nya sudah lengkap petugas pelayanan akan meneruskan ke Operator SIAK Kecamatan

Petugas pelayanan akan menghubungi pemohon untuk pengambilan dokumen kependudukan yang diajukan. Pemohon datang ke kecamatan dengan **membawa berkas persyaratan pengajuan dokumen kependudukan** untuk **ditukar** dengan dokumen kependudukan yang sudah di cetak/ diproses.

**STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN
LUMAJANG MELALUI INOVASI PELAYANAN**

**“ BCA “
(BERKAS CUKUP WA)**

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELEVERY)

1. Persyaratan ;

KTP ELEKTRONIK HILANG ATAU RUSAK

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Terbaru dan data sudah benar
2. Mengisi formulir permohonan
3. KTP Asli (Jika Rusak)
4. Fotocopy KTP dan surat laporan kehilangan dari kepolisian (Jika hilang)

KARTU KELUARGA (KK)

1. Kartu keluarga asli (Jika perubahan)
2. Fotocopy KK dan Surat Kehilangan dari kepolisian (jika hilang)
3. Fotocopy Berkas Pendukung yang berkaitan dengan perubahan data misalnya Akta kelahiran dan lainnya.

AKTA KELAHIRAN

1. Surat keterangan dari dokter/bidan/penolong kelahiran (Asli) atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta perkawinan orang tua (dilegalisir) atau surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP el orang tua

SURAT PINDAH ANTAR KECAMATAN DALAM SATU KABUPATEN

1. Kartu Keluarga Asli
2. KTP Asli
3. Fotocopy buku nikah

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2023 adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam merealisasikan rencana-rencana yang telah disusun dalam Renstra (Rencana Strategis) dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan rencana serta upaya antisipatif dalam meminimalisir permasalahan yang ada.

Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lumajang belum dapat melaksanakan kewenangan sepenuhnya, hal ini dikarenakan dalam penyusunan Program dan Kegiatan belum mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi, sehingga beberapa tugas pokok dan fungsi tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Demikian Laporan Kinerja tahun 2023 Kecamatan Lumajang disusun, meskipun masih jauh dalam kaidah – kaidah kepatutan dan kebenaran sehingga sangat diharapkan kritik dan masukan konstruktif demi menyempurnakan LKj ini. Semoga LKj ini dapat bermanfaat khususnya untuk OPD Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang.

Lumajang, 31 Januari 2024


Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

LAMPIRAN- LAMPIRAN

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	90%
3	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemberdayaan desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	86%
4	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemenuhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 fasilitasi
5	Meningkatnya pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%
6	Meningkatnya desa tertib administrasi	Persentase desa yang menerapkan RKPDes tepat waktu	82%
		Persentase desa yang menerapkan APBDes tepat waktu	82%
		Persentase desa yang menerapkan LPPDes tepat waktu	82%

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.794.171.920,-
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 9.000.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 287.490.000,-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 20.820.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 7.950.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 140.400.000,-
JUMLAH	Rp 7.259.831.920,-

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML

Lumajang, 10 Januari 2023

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP-19701219 199101 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.

Jabatan : Camat Lumajang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.

Jabatan : Pj. Bupati Lumajang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 02 Oktober 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua

INDAH WAHYUNI, SH, M.Si.


Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701219 199101 1 002

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	93%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%
2	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	90%
3	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemberdayaan desa dan kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	86%
4	Meningkatnya pemenuhan fasilitasi pemenuhan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86%
5	Meningkatnya pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%
6	Meningkatnya desa tertib administrasi	Persentase desa yang menerapkan RKPDes tepat waktu	82%
		Persentase desa yang menerapkan APBDes tepat waktu	82%
		Persentase desa yang menerapkan LPPDes tepat waktu	82%

Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.774.396.384,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 18.900.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 3.667.364.200,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 90.660.000,-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 17.729.250,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 149.850.000,-
JUMLAH		Rp 12.718.899.834,-

Lumajang, 02 Oktober 2023

Pj. BUPATI LUMAJANG

INDAH WAHYUNI, SH. M.Si.

CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
 NIP 19701219 199101 1 002

DATA REALISASI
INDIKATOR KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2023

Perangkat Daerah : KECAMATAN LUMAJANG

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023 (Sampai Bulan Des)	KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA	UPAYA MENYELESAIKAN KENDALA/PERMASALAHAN	FAKTOR KEBERHASILAN TERCAPAINYA KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lumajang	Survey Kepuasan Masyarakat	87,46	84	86,71	Masih adanya biro jasa pengurusan adminduk di Kecamatan (calo)	Memberikan penjelasan dan pengertian kepada para calo untuk tidak melakukan jasa pengurusan adminduk dan membuat baleho	Tetap memberikan pelayanan yang maksimal dengan memperhatikan atau memahami alasan masyarakat melakukan pengurusan adminduk melalui calo
							Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk	Mengadakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat melalui pertemuan secara resmi di Kecamatan,	Kerjasama yang baik dalam memberikan pengertian secara lisan (saat melaksanakan rakor) ataupun online kepada setiap masyarakat dalam pentingnya dokumen adminduk
							Sarana prasarana Kecamatan yang masih belum optimal	Sudah dimasukkan dalam perencanaan untuh bisa segera direalisasikan	Memaksimalkan pemeliharaan dengan menerapkan skala prioritas
							Birokrasi yang terlalu panjang dan terkesan berbelit (khususnya pada pencairan santunan kematian)	Lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait (Dinsos dan PT POS Indonesia)	Koordinasi yang baik antara masyarakat, dan pemberi jasa pelayanan (Kecamatan, Dinas Sosial, dan PT POS Indonesia)

DATA REALISASI
INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2023

Perangkat Daerah : KECAMATAN LUMAJANG

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2023 (<i>Sampai Bulan Des</i>)	KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA	UPAYA MENYELESAIKAN KENDALA/PERMASALAHAN	FAKTOR KEBERHASILAN TERCAPAINYA KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah fasilitas dan Koordinasi yang Ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitas dan Koordinasi dikali 100%	100%	93%	100%	Masih terbatasnya SDM Desa yang menguasai bidang administrasi Desa khususnya pembangunan fisik	Memberikan pendampingan dan konsultasi intensif pada Desa untuk menggunakan jasa swasta yang menguasai pembangunan fisik	Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , TPD /Korcam dan Perangkat Desa
							Masih kurangnya SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat	Memfaatkan tenaga /SDM yang ada di Kecamatan secara maksimal	Kerjasama yang baik dari masing masing personil di Kecamatan Lumajang
							Masih belum kooperatif nya Kepala Desa dan Perangkat dalam pelaporan administrasi desa khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB)	Melakukan pembinaan dan peringatan kepada Desa dan Kelurahan untuk segera melakukan pembayaran PBB tepat waktu dan tepat jumlah	Memberikan teguran secara lisan bahkan tertulis oleh Camat melalui Kasi Pemerintahan
							Masih belum adanya integrasi pada pelaporan aset dan keuangan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan (masih perekapan secara manual)	Koordinasi secara intensif dengan pengurus barang dan pengelola keuangan di Kelurahan	Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , dan Kelurahan
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun RKPDDes tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDDes tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDes tepat waktu dibagi Seluruh Desa di wilayah Kecamatan dikali 3 dokumen administrasi pemerintahan Desa	100%	85%	100%	Masih ada desa yang harus selalu diberikan peringatan untuk segera melaksanakan pelaporan administrasi Desa secara tepat waktu	Camat melalui Korcam dan TPD untuk selalu mengingatkan dan memberikan deadline kepada setiap Desa dalam masa pelaporan administrasi Desa	Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan , dan Desa

DATA REALISASI													
Perangkat Daerah : KECAMATAN LUMAJANG													
NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	REALISASI TAHUN 2022		TARGET TAHUN 2023		REALISASI TAHUN 2023 (Sampai Bulan Des)		KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN KINERJA	UPAYA MENYELESAIKAN KENDALA/PERMASALAHAN	FAKTOR KEBERHASILAN TERCAPAINYA KINERJA
					KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas operasional perkantoran yang direncanakan dikali 100	100%	8,086,037,391	100%	8,826,972,646	98%	8,631,303,308	Pelaporan keuangan dan aset masih belum terintegrasi (manual excel), Adanya rencana rebikusing anggaran, adanya penyesuaian spesifikasi pada pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Koordinasi secara intens dengan penanggungjawab keuangan dan aset dan melaporkan segala kekurangan kepada atasan (lurah) di tingkat Kelurahan	Kerjasama dan tanggungjawab baik tingkat Kecamatan dan Kelurahan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	(Jumlah pelayanan paten yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP/Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat)x 100	100%		90%	18,900,000	100%	18,900,000	Kurang maksimal dalam pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik di Kecamatan	Pemeliharaan dengan memperhatikan skala prioritas dan mengusulkan pengadaan barang untuk tahun yang akan datang	Memaksimalkan sarana prasarana yang ada dengan baik
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat/Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah (persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa+persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan kelurahan+Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan+Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan) dibagi 4	100%	3,515,848,400	86%	3,867,898,650	98%	3,802,153,900	Adanya pergeseran kode rekening untuk kegiatan Posyandu dan perubahan sistem pembayaran melalui kas bank /pindah buku dan adanya perubahan sumber dana (DAU Kelurahan)	Melakukan koordinasi secara berjenjang dengan BPKD dan Pihak Bank Jatim, sosialisasi kepada pokmas terkait perubahan sistem pembayaran dan prosedur	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat Kecamatan, Perangkat Daerah sampai masyarakat
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Keteritban Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Keteritban Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Keteritban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Keteritban Umum yang direncanakan x 100 %	100%	125,280,000	86%	100,005,000	73%	73,260,000	Masih adanya ketimpangan selaku stakeholder /penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Linmas antara Kecamatan, Desa dan Satpol PP, adanya perbedaan jumlah anggaran pada transport Bhabinsa/ Bhabinkamtibmas di tingkat Kelurahan	Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak yang berkepentingan dan pihak pemangku kebijakan dan memberikan sosialisasi kepada para anggota linmas	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat Kecamatan, Perangkat Daerah sampai masyarakat (linmas)
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %	100%	2,400,000	100%	17,625,000	100%	17,625,000	Terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan audiensi forkopincam kurang maksimal	Memaksimalkan koordinasi kewilayahan	Kerjasama dan koordinasi yang sinergi
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100%	137,700,000	82%	140,400,000	75%	105,750,000	1.Terkendala dengan status kewenangan oleh Desa 2.Desanya kurang disiplin dalam pelaksanaan tahapan penyusunan RKPDes, 3.SDM Perangkat Desa yang kurang memadai dalam hal teknis (pembuatam RAB, gambar teknis dll)	1.Koordinasi dengan PD terkait tentang status kewenangan yang boleh dikerjakan oleh Desa 2.Membuatkan timeline tahapan penyusunan RKPDesa dan melakukan pendampingan secara intens oleh Camat, Kasi Pemberdayaan, Kasi Tapem melalui koorcam dan TPD 3.berkonsultasi dengan tenaga teknis yang sudah berpengalaman	Koordinasi, fasilitasi dan pendampingan dari kecamatan kepada desa
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100%		82%		100%	0	1.Jadwal pelaksanaan musdes yang dilaksanakan pada malam hari, 2.Belum mengetahui nominal pagu indikator untuk tahun berikutnya	1.Tetap menghadiri sebagai bentuk fasilitasi tim pendamping Kecamatan 2.Menggunakan pagu indikator tahun ini/tahun berjalan, apabila ada perubahan maka akan disesuaikan dalam PAK APBDesa	Komitmen dari semua pihak baik tingkat Kecamatan dan Desa
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100%		82%		100%	0	Penyampaian data dari masing masing Kaur dan Kasi selaku penanggungjawab belum tepat waktu	Sekdes berperan aktif dalam mengkoordinir data dan laporan sehingga bisa tepat waktu	Komitmen dari semua pihak baik tingkat Kecamatan dan Desa
						11,867,265,791		12,971,801,296	98%	12,648,992,208			

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN, DAN REALISASI ANGGARAN												
TRIBUNAL IV TAHUN 2023												
SATKER : KECAMATAN LUMAJANG												
KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI TW 4	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	KETERANGAN
	TOTAL								12,467,485,648	12,171,365,309	97.62%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100%	100%	8,773,771,397	8,589,345,808	97.90%	
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100%	100%	29,420,000	24,370,000	82.83%	
7.01.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10,739,000	10,739,000	100.00%	
7.01.01.2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18,681,000	13,631,000	72.97%	
7.01.01.2.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11,492,000	11,492,000	100.00%	
7.01.01.2.01.06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen LAKIP	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	2,624,000	2,624,000	100.00%	
7.01.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7,387,500	6,387,500	86.46%	
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100%	100%	6,417,048,690	6,327,304,057	98.60%	
7.01.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	62 ASN	62 ASN	62 ASN	6,173,205,690	6,087,637,169	98.61%	
7.01.01.2.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	208,603,000	208,603,000	100.00%	
7.01.01.2.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	20,200,000	19,329,888	95.69%	
7.01.01.2.02.05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 laporan	6 laporan	6 laporan	12,500,000	9,194,000	73.55%	
7.01.01.2.02.06			Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	740,000	740,000	100.00%	
7.01.01.2.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan bulanan, triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1,800,000	1,800,000	100.00%	
7.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100%	100%	4,698,000	4,698,000	100.00%	
7.01.01.2.03.01			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan RKBMD Perubahan yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4,698,000	4,698,000	100.00%	
7.01.01.2.03.05			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	2 laporan	2 laporan	2 laporan	5,163,000	4,434,000	85.88%	
7.01.01.2.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	12 laporan	12 laporan	12 laporan	14,770,000	14,520,000	98.31%	
7.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	0%	0 %	0 %	24,550,000	24,365,000	99.25%	
7.01.01.2.05.02			Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang terfasilitasi	3 paket	3 paket	3 paket	24,550,000	24,365,000	99.25%	
7.01.01.2.05.03			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	2,500,000	100.00%	

KODE	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI TW 4	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	KETERANGAN
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100%	100%	365,933,340	349,400,592	95.48%	
7.01.01.2.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	13,444,130	17,299,771	128.68%	
7.01.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	173,629,030	160,530,445	92.46%	
7.01.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	60,304,180	49,103,976	81.43%	
7.01.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4,125,000	16,570,000	401.70%	
7.01.01.2.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun	8 laporan	8 laporan	8 laporan	114,431,000	105,896,400	92.54%	
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100%	100%	75,981,609	75,981,609	1	
7.01.01.2.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	75,981,609	75,981,609	98.89%	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100%	100%	1,475,267,600	1,432,309,702	97.09%	
7.01.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah fasilitas jasa surat menyurat	8 laporan	8 laporan	8 laporan	35,784,000	33,788,000	94.42%	
7.01.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		jumlah rekening yang dibayar	8 laporan	8 laporan	8 laporan	204,218,000	164,990,696	80.79%	
7.01.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	8 laporan	8 laporan	8 laporan	1,235,265,600	1,233,531,006	99.86%	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	100%	100%	380,872,158	350,916,848	92.14%	
7.01.01.2.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	28 unit	28 Kendaraan	28 Kendaraan	64,499,800	58,142,402	90.14%	
7.01.01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	130 unit	2 Jenis	2 Jenis	89,050,000	81,555,000	91.58%	
7.01.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/ direhabilitasi	7 unit	1 gedung	1 gedung	227,322,358	211,219,446	92.92%	
7.01.03	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Teraksananya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/ keuangan tepat waktu	86 %	100%	100%	18,900,000	18,900,000	100.00%	
7.01.03.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/ keuangan tepat waktu	86 %	100%	100%	18,900,000	18,900,000	100.00%	
7.01.03.2.01.03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18,900,000	18,900,000	100.00%	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI TW 4	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	KETERANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu	2,76	3	3	3,516,789,250	3439744500		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu	86 %	100%	100%	150,985,000	150,985,000	100.00%	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 lembaga	750 Orang	750 Orang	3,600,000	3,600,000	100.00%	
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan yang tersusun	1 dokumen	1 Paket	1 Paket	3,950,000	3,950,000	100.00%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tersusun	5 laporan	12 bulan	12 bulan	143,435,000	143,435,000	100.00%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu	95 %	100%	100%	3,298,084,750	3,232,340,000	1	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	38,655,000	35,115,000	90.84%	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	4 pokmas/ ormas	3,259,429,750	3,197,225,000	98.09%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu	95 %	100%	100%	67,719,500	56,419,500	83.31%	
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	7 Keluarga	7 Keluarga	7 Keluarga	26,820,000	20,820,000	77.63%	
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7 Keluarga	7 Keluarga	7 Keluarga	29,799,500	27,299,500	91.61%	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7 Keluarga	7 Keluarga	7 Keluarga	5,350,000	2,550,000	47.66%	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkooperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	7 Keluarga	7 Keluarga	7 Keluarga	2,925,000	2,925,000	100.00%	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	7 Keluarga	7 Keluarga	7 Keluarga	2,825,000	2,825,000	100.00%	





FOTO PEMBINAAN ,KOORDINASI DAN EVALUASI TARGET DAN REALISASI KINERJA



